YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.7033

EVALUASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA SOLOK

Evaluation of the Uninhabitable Housing (RTLH) Program in Solok City

Adelia Kurniati Ilda & Yuliarti
Universitas Negeri Padang
adeliakurniati118@gmail.com; yuliarti@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 26, 2025	Jul 20, 2025	Aug 1, 2025	Aug 6, 2025

Abstract

The high number of uninhabitable houses (*Rumah Tidak Layak Huni*, RTLH) in Solok City, despite the implementation of the RTLH improvement program since 2017. The research aims to evaluate the implementation of the RTLH Program by the Solok City Housing and Settlement Area Office and to identify the inhibiting factors affecting its execution. A qualitative approach with a descriptive method was used, with data collected through interviews, documentation, and observation. Data validation was carried out using triangulation techniques. The findings show that the RTLH program has had a positive impact on improving the quality of housing and the well-being of its beneficiaries. However, the implementation still faces several obstacles, including low levels of community self-help participation, delays in the distribution of building materials, and administrative barriers, particularly regarding proof of land ownership. The study concludes that although the RTLH program is relatively effective and efficient, improvements in supervision, data management systems, and more targeted outreach strategies are necessary to maximize the program's long-term benefits for low-income communities.

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Keywords: RTLH Program; Implementation Evaluation; Housing Policy; Low-Income Communities; Solok City

Abstrak: Tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok, meskipun program bantuan perbaikan RTLH telah dilaksanakan sejak 2017. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program RTLH oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program RTLH telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi swadaya masyarakat, keterlambatan dalam distribusi bahan bangunan, serta hambatan administratif, terutama terkait bukti kepemilikan tanah. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun program RTLH cukup efektif dan efisien, peningkatan pengawasan, perbaikan sistem pendataan, dan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat program secara berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Program RTLH; Evaluasi Implementasi; Kebijakan Perumahan; Masyarakat Miskin; Kota Solok

PENDAHULUAN

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan isu mendesak dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Ketersediaan hunian yang sehat, layak, dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di Kota Solok, jumlah RTLH pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2.562 unit, menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang berkelanjutan. Program bantuan perbaikan RTLH menjadi salah satu solusi yang ditempuh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin (Mardhanie, 2018). Namun, efektivitas program tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan evaluasi mendalam mengenai pelaksanaannya.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang ditujukan untuk rumah tangga miskin (RTM) dan merupakan bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka. Program ini melibatkan perbaikan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, dengan penekanan pada

peningkatan atap, lantai, dinding, dan fasilitas MCK (Christiyani et al., 2019). Menurut Taufik dan Sriharyati, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal di tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan. Tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat (Sururi et al., 2019). Salah satu daerah yang melaksanakan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Kota Solok. Program RTLH Kota Solok di atur dalam peraturan Walikota Solok No. 30 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan. Pemerintah kota solok melaksanakan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dikarenakan program tersebut menjadi salah satu program yang dijadikan sebagai prioritas utama oleh Pemerintah Kota Solok dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi masalah kemiskinan, serta tercapainya visi pembangunan Kota Solok yang mendukung Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu terwujudnya Kota Tanpa Kawasan Kumuh (Data Laporan DPRKPP,2020).

Program ini didanai oleh beberapa sumber, yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Dari data yang ada, program ini telah berjalan sejak tahun 2017 hingga 2023, dengan jumlah unit yang bervariasi tiap tahunnya. Pendanaan APBD digunakan pada tahun 2019, 2022, dan 2023. Selain itu, terdapat juga pendanaan dari BSPS pada tahun 2019. Secara keseluruhan, jumlah unit perbaikan rumah mencapai 1.195 unit. Jika dilihat per tahun, jumlah tercatat pada tahun 2019 dengan 4 unit dari APBD, dan 420 unit dari BSPS, sehingga totalnya mencapai 586 unit. Sementara itu, tahun dengan jumlah unit terendah adalah 2022, dengan hanya 62 unit yang didanai oleh APBD. BSPS mendanai kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas permukiman.

Selain itu dalam pelaksanaannya sering ditemukan kendala signifikan berupa keterlambatan pengiriman bahan bangunan dari toko atau penyedia material ke lokasi pembangunan. Keterlambatan ini menyebabkan proses pembangunan menjadi terhambat. Dampak lain dari keterlambatan ini adalah penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan penyelesaian pembangunan rumah tidak sesuai target waktu yang ditetapkan. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas program RTLH dalam mengentaskan rumah tidak layak

huni secara tepat waktu dan tepat sasaran (Hariyono, 2010). Faktor penghambat lainnya juga berasal dari masyarakat. Yaitu kurangnya swadaya dari masyarakat. Keswadayaan ini berupa kontribusi dana, tenaga, maupun partisipasi aktif dalam proses pembangunan rumah. Banyak penerima bantuan mengalami kesulitan menyediakan dana swadaya yang menjadi syarat pelaksanaan program, sehingga program tidak berjalan optimal. Keterbatasan swadaya ini disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar berasal dari kelompok miskin atau sangat miskin, yang tidak mampu menambah biaya di luar bantuan yang diberikan, sehingga tidak heran jika ekonomi memiliki pengaruh yang besar (Nisa & Salomo, 2019).

Evaluasi program RTLH secara umum adalah proses menilai sejauh mana program perbaikan rumah tidak layak huni telah mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti peningkatan kualitas hunian, kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas penggunaan anggaran (Vadreas et al., 2018). Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan program ke depan (Silitonga, 2022). Evaluasi program RTLH di Kota Solok mencakup beberapa aspek utama yang menentukan keberhasilan program ini. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketepatan sasaran penerima manfaat. Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan juga menjadi faktor penting dalam evaluasi. Program RTLH di Kota Solok sebagian besar dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh masyarakat setempat, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan rumah. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa bantuan material dan pendampingan teknis belum sepenuhnya optimal, sehingga berpengaruh terhadap kualitas hasil pembangunan. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan implementasi program RTLH di masa mendatang (Muryadi, 2017). Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan program RTLH, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dalam menciptakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat miskin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang menjabarkan berbagai hal temuan secara lapangan (Sugiyono, 2019), yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses, pelaksanaan, dan hasil dari Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok. Fokus utama penelitian adalah menggali proses implementasi program, keterlibatan aktor-aktor pelaksana, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Subjek penelitian meliputi pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok, aparat kelurahan, serta masyarakat penerima bantuan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi seperti laporan program, foto, dan data statistik. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu mulai 5 Juni hingga 26 Juli 2025, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif dengan mengacu pada model(Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk difokuskan pada indikator evaluasi program RTLH. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan foto lapangan agar mempermudah pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, dengan melakukan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan data. Validitas data diperkuat dengan member check kepada informan serta pembandingan dengan data dokumen resmi, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan program RTLH di Kota Solok.

HASIL

Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Solok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok secara umum telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian penerima bantuan. Rumah-rumah yang sebelumnya rusak berat atau tidak memenuhi standar kesehatan

kini telah mengalami perbaikan struktural yang signifikan, sehingga memenuhi syarat kelayakan hunian. Hal ini mencerminkan keberhasilan program terutama dari sisi ketepatan sasaran dan realisasi bantuan fisik.

Dari segi efektivitas pelaksanaan program dilakukan secara terstruktur dengan tahapan survei lapangan, perencanaan teknis, verifikasi administrasi, hingga pelaksanaan rehabilitasi rumah. Peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) menjadi kunci penghubung antara dinas dan masyarakat. TFL melakukan sosialisasi, memverifikasi usulan, serta memantau proses rehabilitasi bersama perangkat kelurahan. Sosialisasi yang intensif membuat prosedur bantuan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

"Kami sebagai TFL memang menjadi penghubung. Mulai dari memberi informasi di kelurahan, mendata warga yang rumahnya tidak layak, sampai memantau pembangunan di lapangan."

Dari segi efisiensi, alokasi anggaran dan koordinasi antar pihak berjalan baik. Anggaran dikelola secara transparan oleh dinas sehingga minim kendala administratif. Meskipun tahun 2025 mengalami keterlambatan karena keterbatasan dana, pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan pengelolaan yang efektif.

"Kalau dari anggaran biasanya lancar, tapi tahun ini ada kendala dana jadi terpaksa tertunda. Tapi koordinasi antar pihak selama ini sudah baik." Ungkap Analisis Infrastruktur Daerah

Secara kecukupan, program telah memenuhi standar kelayakan rumah, termasuk kualitas bahan bangunan, ketersediaan air bersih, sanitasi, pencahayaan, dan ventilasi. Pendampingan dari pihak teknis juga memastikan pembangunan sesuai standar mutu.

"Rumah kami sekarang sudah bagus, ada kamar mandi dalam, air bersih lancar, dan ventilasi cukup. Terima kasih sekali." Ungkap salah satu penerima manfaat

Ketepatan sasaran program menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan verifikasi ketat untuk memastikan penerima bantuan sesuai kriteria. Bagi warga yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, disediakan alternatif seperti rumah susun.

"Tidak semua yang mengajukan bisa lolos. Kami cek sertifikat tanah, kondisi rumah, dan penghasilan. Kalau tidak memenuhi syarat, kami arahkan ke bantuan lain." Ungkap salah satu staf kelurahan

Kendala utama faktor penghambat yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti peralatan administrasi yang kurang memadai dan minimnya fasilitas transportasi operasional, sehingga petugas sering menggunakan kendaraan pribadi. Hambatan lain adalah ketergantungan pada dana yang terbatas, di mana pada tahun 2025 tidak ada alokasi DAK maupun APBD untuk program ini sehingga kegiatan terhenti.

"Kami sering kesulitan karena printer dan alat administrasi terbatas, transportasi juga pakai motor pribadi. Kalau dana, tahun ini memang tidak ada, jadi program berhenti." Ungkap pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok

Unruk memperjalas hal diatas maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Program RTLH Kota Solok

Aspek	Temuan Utama	Ungkapan Wawancara
Efektivitas	Tahapan pelaksanaan terstruktur, peran TFL krusial	"Kami sebagai TFL memang menjadi penghubung…" (TFL)
Efisiensi	Anggaran transparan, koordinasi baik, ada kendala 2025	"Kalau dari anggaran biasanya lancar…" (Analis Infrastruktur)
Kecukupan	Standar kualitas rumah terpenuhi, ada pendampingan teknis	"Rumah kami sekarang sudah bagus…" (Penerima Manfaat)
Ketepatan Sasaran	Verifikasi ketat, solusi alternatif untuk yang tak lolos	"Tidak semua yang mengajukan bisa lolos…" (Staf Kelurahan)
Hambatan	Sarana prasarana terbatas, dana tidak berkelanjutan	"Kami sering kesulitan karena printer…" (Pegawai Dinas)

Berdasarkan tabel 1 diatas maka dapat dijelaskan temuan penelitian, pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok menunjukkan bahwa dari aspek efektivitas, program telah berjalan secara terstruktur dengan peran penting Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam menghubungkan dinas dan masyarakat. Dari sisi efisiensi, anggaran dikelola secara transparan dan koordinasi antar pihak berjalan baik, meskipun pada tahun 2025 terdapat kendala pendanaan yang menyebabkan penundaan. Pada aspek kecukupan, rehabilitasi rumah telah memenuhi standar kelayakan hunian dengan fasilitas dasar yang memadai, disertai pendampingan teknis yang memastikan mutu pembangunan. Dari segi ketepatan sasaran, mekanisme verifikasi yang ketat memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria, dengan alternatif solusi bagi yang tidak lolos persyaratan. Namun demikian, program menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti peralatan administrasi dan transportasi operasional, serta ketergantungan pada sumber dana yang tidak berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini berfokus pada rehabilitasi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan, sehingga dapat memberikan lingkungan hunian yang sehat dan aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas rumah penerima bantuan mengalami peningkatan signifikan dari segi struktur dan fasilitas dasar. Hal ini selaras dengan penelitian (Jusuf Leiwakabessy et al., 2023) yang menyebutkan bahwa program perumahan layak huni mampu menurunkan risiko kesehatan akibat kondisi rumah yang buruk. Keberhasilan ini mencerminkan kesesuaian antara tujuan program dengan hasil yang dicapai di lapangan sehingga mendukung program kemajuan dan penyelesaian masalah.

Dari sisi efektivitas, pelaksanaan program telah mengikuti tahapan yang jelas mulai dari survei, perencanaan teknis, verifikasi administrasi, hingga pelaksanaan rehabilitasi. Kejelasan tahapan ini memudahkan koordinasi antara dinas, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dan masyarakat. Peran TFL terbukti sangat penting dalam memastikan kelancaran komunikasi dan sosialisasi program. Temuan ini diperkuat oleh studi (Nalatissifa & Ramdhani, 2020) yang menegaskan bahwa fasilitator lapangan memiliki peran kunci dalam keberhasilan program berbasis masyarakat. Dengan adanya TFL, hambatan komunikasi antara pemerintah dan penerima manfaat dapat diminimalkan.

Efisiensi pelaksanaan program dapat dilihat dari pengelolaan anggaran yang transparan dan penggunaan sumber daya yang optimal. Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur anggaran dengan prosedur yang jelas, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan. Walaupun terdapat kendala dana pada tahun 2025, secara umum pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan efisiensi yang baik. Hal ini sejalan dengan (Suratman, 2023) yang menyebutkan bahwa transparansi anggaran dalam program sosial berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan program di masa depan.

Kecukupan program tercermin dari kualitas hasil rehabilitasi rumah yang memenuhi standar kelayakan hunian. Standar tersebut meliputi ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pencahayaan, dan ventilasi yang memadai. Mayoritas penerima manfaat menyatakan puas dengan hasil rehabilitasi yang dilakukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nur & Siahaan, 2022) yang menemukan bahwa peningkatan kualitas fisik rumah dapat berdampak

langsung pada kesehatan dan kenyamanan penghuni. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berhasil memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penghuni.

Begitupula dari segi ketepatan sasaran program menjadi salah satu indikator keberhasilan RTLH di Kota Solok. Proses verifikasi yang ketat memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penerapan kriteria seperti kepemilikan sertifikat tanah dan kondisi ekonomi menjadi filter penting dalam penentuan penerima manfaat. Hasil ini didukung oleh studi (Pratama et al., 2020)yang menekankan pentingnya verifikasi berbasis data untuk mencegah salah sasaran dalam program bantuan sosial. Mekanisme ini membuat bantuan lebih tepat guna dan efektif.

Sosialisasi yang dilakukan secara intensif turut berperan dalam memastikan keberhasilan program. Sosialisasi tidak hanya dilakukan di tingkat kelurahan tetapi juga melibatkan kecamatan dan perangkat masyarakat seperti RT dan RW. Penyebaran informasi yang merata membuat calon penerima bantuan memahami prosedur dan persyaratan dengan baik. Penelitian (Yuliastuti, 2019) menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi program sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengajuan bantuan. Dengan demikian, kualitas sosialisasi menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan RTLH.

Namun demikian, pelaksanaan program menghadapi hambatan dari sisi sarana dan prasarana pendukung. Pelaksanaan Program RTLH di Kota Solok menghadapi kendala yang cukup berarti pada aspek sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan fasilitas administrasi seperti ketersediaan dokumen, alat tulis, dan peralatan kantor seperti printer yang tidak memadai menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan dan pelaporan program. Selain itu, keterbatasan fasilitas transportasi operasional juga memaksa petugas menggunakan kendaraan pribadi saat pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana yang tidak optimal tidak hanya menghambat proses pelaksanaan teknis program, tetapi juga turut berdampak pada kelancaran proses administrasi dan evaluasi program. Hal ini menandakan perlunya peningkatan dukungan fasilitas pendukung agar pelaksanaan dapat berjalan lebih efisien dan terorganisir. Kondisi ini sesuai dengan penelitian (Surya, 2018) yang mengungkapkan bahwa kekurangan fasilitas pendukung dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan program sosial. Maka dri itu, peningkatan dukungan fasilitas menjadi kebutuhan mendesak.

Selain kendala sarana prasarana, masalah utama yang sangat mempengaruhi keberlanjutan program adalah keterbatasan sumber pendanaan. Dana yang selama ini dikelola berasal dari berbagai sumber seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD, namun sejak tahun 2025 sumber dana tersebut tidak tersedia lagi sehingga pelaksanaan program tidak dapat dilanjutkan pada tahun tersebut. Ketergantungan pada dana yang bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan ini menjadi penghambat serius bagi kelangsungan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Solok. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya strategis pemerintah daerah dalam mencari sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan agar program RTLH dapat terus dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Suawa et al., 2022) yang menegaskan bahwa ketidakpastian pendanaan adalah faktor risiko utama dalam keberlanjutan program bantuan sosial. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan yang lebih stabil.

Dari perspektif manajemen program, RTLH di Kota Solok telah memenuhi sebagian besar prinsip perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Namun, aspek perencanaan jangka panjang terutama terkait pendanaan dan infrastruktur pendukung masih perlu diperkuat. Hal ini penting agar program dapat berjalan konsisten tanpa terhenti karena faktor teknis atau finansial. Penelitian (Tursilarini & Udiati, 2020) menunjukkan bahwa manajemen program yang kuat mencakup perencanaan berkelanjutan, pengelolaan risiko, dan strategi pembiayaan jangka panjang. Tanpa hal ini, keberhasilan program sulit dipertahankan.

Evaluasi secara berkala menjadi salah satu rekomendasi penting untuk meningkatkan kualitas program. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki proses, dan menyesuaikan strategi pelaksanaan. Data evaluasi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengajuan pendanaan kepada pemerintah pusat maupun lembaga donor. Studi oleh (Suhaeni, 2010)menegaskan bahwa evaluasi berkelanjutan adalah kunci adaptasi program dalam menghadapi dinamika lapangan. Dengan demikian, evaluasi menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas program.

Program RTLH di Kota Solok juga memberikan dampak sosial yang positif bagi penerima manfaat. Selain peningkatan kualitas hunian, penerima bantuan merasa lebih percaya diri dan memiliki rasa aman tinggal di rumah yang layak. Kondisi ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tursilarini & Udiati, 2020)yang menemukan bahwa perbaikan rumah

memiliki efek positif terhadap kesehatan mental dan interaksi sosial warga. Dampak sosial ini menjadi nilai tambah yang tidak kalah penting dibandingkan manfaat fisik program.

Dari hal tersebut, secara keseluruhan, pelaksanaan RTLH di Kota Solok menunjukkan keberhasilan pada aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan sasaran. Meski demikian, kendala sarana prasarana dan pendanaan masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Penguatan aspek pendukung seperti fasilitas administrasi, transportasi operasional, dan sumber dana berkelanjutan menjadi prioritas perbaikan. Dukungan kebijakan dan kolaborasi antar pihak juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program. Dengan perbaikan ini, diharapkan program RTLH dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin di Kota Solok.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solok secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini terbukti mampu menjawab tujuan utama penelitian, yaitu menilai efektivitas pelaksanaannya dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun program berhasil direalisasikan secara fisik dan menyasar kelompok sasaran yang tepat, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterlambatan distribusi bahan bangunan, rendahnya partisipasi swadaya, serta persoalan administratif seperti bukti kepemilikan tanah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan lokal, bukan semata perencanaan teknis.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis terhadap penguatan teori implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks daerah dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Implikasi praktisnya mengarah pada perlunya perbaikan sistem pendataan, peningkatan komunikasi antarpemangku kebijakan, serta pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan program. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah dan jumlah informan, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh variasi pengalaman penerima bantuan di seluruh kecamatan. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan wilayah dan melibatkan pendekatan kuantitatif agar dapat mengukur secara lebih rinci dampak sosial ekonomi dari program RTLH dalam jangka panjang.

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) memperluas cakupan kajian pada aspek keberlanjutan program dan model pendanaan alternatif yang dapat mendukung pelaksanaan secara konsisten. Fokus penelitian ke depan dapat diarahkan pada analisis kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah dalam pembiayaan rehabilitasi rumah, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD yang bersifat fluktuatif. 2) mengkaji secara lebih mendalam peran teknologi informasi dalam mendukung proses verifikasi, monitoring, dan evaluasi program, sehingga efektivitas dan transparansi pelaksanaan dapat meningkat. Kajian komparatif antar daerah dengan program serupa juga penting dilakukan untuk menemukan praktik terbaik (best practices) yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi Kota Solok. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan solusi strategis yang lebih komprehensif untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program RTLH di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Christiyani, B. R., Sulistiyani, S., & Budiyono, B. (2019). Analisis Kondisi Rumah Berdasarkan Tingkat Pemahaman Rumah Sehat di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, *18*(3), 31. https://doi.org/10.14710/mkmi.18.3.%p

Hariyono, P. (2010). *Perencanaan Pembangunan Kota Dan Perubahan Paradigma*. Pustaka Pelajar.

Jusuf Leiwakabessy, Putri Indah Cahyani, & Sherly Lewerissa. (2023). Sosialisasi Pengenalan Persyaratan Rumah Yang Aman dan Layak Huni Menurut SDGs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *2*(4), 26–32. https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i4.753

Mardhanie, B. A. (2018). Penelitian Rumah Tidak layak Huni (RTLH) Kabupaten Bulungan Tahun 2017: (Jumlah dan Prioritas Penanganan). *Jurnal Kreatif: Desain Produk Industri Dan Arsitektur*, *5*(2), 56. https://ejurnal.polnes.ac.id/index.php/kreatif/issue/view/7

Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.

Muryadi, A. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran)*, *3*(1), 1. https://ejournal.utp.ac.id/index.php/jip/article/view/538

Nalatissifa, H., & Ramdhani, Y. (2020). Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, *19*(2), 246–256. https://doi.org/10.30812/matrik.v19i2.638

Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak

Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7

Nur, N. Y., & Siahaan, A. Y. S. (2022). Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) Di Kelurahan Sunggal Kota Medan. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *9*(2), 405. https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3389

Pratama, N. B., Purnomo, E. P., & Agustiyara, A. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *6*(2), 64–74. https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8045

Silitonga, D. (2022). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*. Zahira Media Publisher.

Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2022). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Governance*, *1*(2), 18. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.

Suhaeni, H. (2010). Tipologi Kawasan Perumahan dengan Kepadatan Penduduk Tinggi dan Penanganannya. *Jurnal Permukiman*, *5*(3), 116. https://doi.org/10.31815/jp.2010.5.116-123

Suratman, S. I. (2023). *Buku Ajar : Kebijakan Publik*. Adanu Abimata.

Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. (2019). *Dinamic Governance Dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Serang*. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi.

Surya, R. Z. (2018). PEMETAAN KESELARASAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) PADA RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, *4*(1), 69. https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v4i1.84

Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *4*(1), 39. https://doi.org/10.31105/mipks.v44i1.1973

VADREAS, A. K., TURAINA, R., & ARDIANSYAH, S. (2018). Sistem Penunjang Keputusan Penentuan (Spk) Bantuan Dana Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dengan Metode Multi Factor Evoluation Process) (MFEP). *JURNAL TEKNOIF*, *6*(1), 18–23. https://doi.org/10.21063/JTIF.2018.V6.1.18-23

Yuliastuti, Y. (2019). Sosialisasi Pendataan Perumahan Berbasis Tabungan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). *Jurnal Pasopati,* *1*(3), 17. https://doi.org/10.14710/pasopati.2019.5358